

Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Aceh (Studi Pada UMKM di Kota Banda Aceh)

Israk Ahmadsyah¹
Jalilah²
Renail Rozy³

israk.ahmadsyah@ar-raniry.co.id¹
jalilah@ar-raniry.ac.id²
170603175@student.ar-raniry.ac.id³

^{1,2,3} **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia**

ABSTRACT

The rapid development of information technology, especially FinTech, has led the dominance of digital finance in Indonesia through digital wallet applications and QR Code. QRIS, the non-cash payment standard of Bank Indonesia, facilitates transactions for consumers and merchants. In Banda Aceh UMKM sector, QRIS is growing rapidly, providing transaction facility but also facing challenges. The study aims to find out how the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in the Small and Medium Small Enterprises (UMKM) sector in Banda Aceh City is problematic by showcasing the mechanisms of QRIS implementation, its positive impact on UMKM, and the challenges faced. The study uses a qualitative approach with descriptive analysis and the number of informants in the study as many as 17 informants. The research finds that while QRIS has a positive impact, there are barriers such as costs, internet connectivity, application technical problems, as well as a lack of customer improvement and benefits for UMKM. Solutions such as cost subsidies, better internet infrastructure, application updates, efficient time transactions between banks, and educational programmes are needed to address these challenges.

Keywords: QRIS, UMKM, Implementation Problems of QRIS

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi, terutama FinTech, memimpin dominasi keuangan digital di Indonesia melalui aplikasi dompet digital dan QR Code. QRIS, standar pembayaran non-tunai dari Bank Indonesia, memudahkan transaksi bagi konsumen dan merchant. Di sektor UMKM Banda Aceh, QRIS berkembang pesat, menyediakan kemudahan transaksi namun juga menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh dengan memaparkan mekanisme implementasi QRIS, dampak positifnya terhadap UMKM, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan analisis deskriptif dan jumlah informan dalam penelitian sebanyak 17 informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun QRIS memberikan dampak positif, ada kendala seperti biaya, konektivitas internet, masalah teknis aplikasi, serta kurangnya peningkatan pelanggan dan keuntungan bagi UMKM. Solusi seperti subsidi biaya, infrastruktur internet yang lebih baik, pembaruan aplikasi, efisiensi waktu transaksi antar bank, dan program edukasi dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kata Kunci: *QRIS, UMKM, Problematika Penerapan QRIS.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, bidang industri teknologi informasi mengalami peningkatan secara pesat. Hal ini disebabkan karena banyaknya sarana dan prasana yang menggunakan teknologi bagi masyarakat dalam hal memanfaatkan sumber daya menjadi lebih mudah. Salah satu implementasi teknologi di era digital ini ialah kegiatan transaksi keuangan secara digital atau dikenal dengan Financial Technology atau FinTech (Azzahroo & Estiningrum, 2021). Dalam peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 disebutkan FinTech merupakan suatu penggunaan teknologi sistem keuangan yang menciptakan produk layanan, model, atau teknologi bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, kelancaran, efisiensi, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran. Percepatan perkembangan ekonomi dan inklusi keuangan digital di suatu negara diyakini akan semakin mudah dengan pengimplementasian FinTech (Harahap, 2021).

Seiring dengan meningkatnya FinTech, saat ini akses pembayaran dalam bentuk digital non-tunai juga berkembang di Indonesia. Terdapat aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu dompet digital (E-wallet), yang memungkinkan pengguna dapat menyimpan sejumlah dana dengan jumlah nominal tertentu di dalam aplikasi yang dapat diakses melalui Handphone sehingga dapat menjadi lebih praktis penggunaannya. Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa aplikasi dompet digital yang populer seperti OVO, GoPay, Dana, LinkAja dan lainnya (Yuliati & Handayani, 2021). Selain itu, terdapat pula alternatif pembayaran dengan menggunakan QR Code. Mekanisme pembayaran digital ini hanya perlu waktu singkat saja sampai transaksi dinyatakan berhasil dan bukti transaksi secara otomatis akan terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen (Amanda & Tambunan, 2022).

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia, telah meluncurkan metode pembayaran yang berbasis shared delivery channel untuk instrumen pembayaran yang berbasis server yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Metode pembayaran ini digunakan untuk menstandarisasi seluruh pembayaran non-tunai yang menggunakan Kode QR. Salah satu alasan diperkenalkannya metode pembayaran ini adalah karena para pedagang di pasar atau marketplace ketika dalam bertransaksi non-tunai harus menyediakan banyak Kode QR dari berbagai penerbit. Penggunaan kode QR merupakan sistem pembayaran yang sedang mengalami trend. Dengan kode QR bisa memuat berbagai informasi di dalamnya seperti alamat URL, teks hingga nomor telepon, dan lainnya. Kode QR biasanya ditempatkan pada berbagai produk untuk menampilkan informasi-informasi tentang produk tersebut. Selain itu, Kode QR ini dapat memasangnya di kartu nama sebagai tambahan informasi. Keunggulan yang dimiliki Kode QR di antaranya adalah penyimpanan dan pemanfaatan data yang akurat serta keunggulan fisik yang tahan lama (Setiawan & Mahyuni, 2020).

Jumlah Merchant pengguna QRIS pada 5 November 2021 telah menyentuh angka 12,2 juta. Angka ini meningkat pesat hingga 297,1% dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebanyak 3,08 juta Merchant. Saat ini, Merchant pada usaha mikro paling banyak terdaftar QRIS, yakni mencapai 7,53 juta pada 5 November 2021. Diikuti Merchant usaha kecil (UK) sebanyak 3,2 juta dan usaha menengah (UM) sebanyak 928 ribu. Usaha besar (UB) memiliki 449,3 ribu Merchant yang terdaftar QRIS. Sementara, dari sektor donasi/sosial memiliki 124,5 ribu Merchant yang telah terdaftar QRIS. Untuk memperluas pengguna QRIS, Bank Indonesia memberikan sejumlah biaya insentif kepada Merchant seperti memperpanjang Merchant discount rate (MDR) QRIS sebesar 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021 serta menaikkan limit atau batas transaksi QRIS dari Rp2 juta per transaksi menjadi Rp5 juta per transaksi (Katadata.co.id, 2021).

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang mudah, aman, dan efisien, penggunaan QRIS ini dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi pembayaran yang telah diunduh di smartphone serta terhubung dengan koneksi internet dengan sebuah aplikasi pembaca QR. Teknologi ini dianggap sebagai cara yang inovatif dalam memberi kemudahan dalam berbagai aktivitas sistem yang ada karena memberikan kecepatan pendataan. Aplikasi-aplikasi seperti E-wallet yang digunakan sebagai instrumen pembayaran berbasis server yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (Ginantra et al., 2020).

Penggunaan QRIS Saat ini tak terlepas dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mendominasi mendominasi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki peran sangat penting dalam

membangun kestabilan perekonomian masyarakat yang terbukti saat ini jenis usaha ini masih berdiri kokoh disaat usaha besar lainnya banyak berjatuhan semenjak pandemi. Pada tahun 2021 Ada sebanyak 64,2 juta usahawan yang tersebar penjuru negeri dengan menyerap tenaga kerja 119 juta pekerja atau menyerap tenaga kerja sebesar 97% di dunia usaha di Indonesia (Mahyuni & Setiawan, 2021).

Keberadaan UMKM menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang dimana angka pengangguran di Aceh terus meningkat sehingga menjadi alternatif lapangan pekerjaan. Termasuk halnya di kota Banda Aceh yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Aceh. Kota ini juga dianggap sebagai kota dengan kawasan strategis dalam sektor perdagangan dengan memiliki potensi, aksesibilitas, dan sebaran kegiatan sektor di wilayah kota dan sekitarnya (Maisarina, Irwansyah, & Izziah, 2017). Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu wilayah dengan persebaran UMKM terbanyak di provinsi Aceh. Dalam pernyataannya, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menyebutkan angka perkembangan usahawan UMKM di Kota Banda.

Aceh telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan sangat pesat dari total 8.900 unit pada 2016 menjadi 17.080 unit di tahun 2022. Dapat dirincikan, pada 2016 jumlah UMKM di kota Banda Aceh sebanyak 8.900 unit. Di tahun 2017 menunjukkan peningkatan menjadi 9.591. Lalu bertambah lagi menjadi 10.944 berlanjut ke tahun ke 2019 mencapai 12.012, lalu 2020 meningkat lagi hingga 15.107 unit. 2021 sebanyak 16.970 usaha, dan hingga Februari 2022 sudah mencapai 17.308 unit usaha. Yang artinya UMKM di kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2017 ke tahun 2022 hingga 92 persen (Antaranews, 2022)

Seiring bertambahnya para pelaku UMKM di Banda Aceh, diperlukan teknologi pembayaran non-tunai untuk mendukung upaya oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan jumlah Merchant yang terintegrasi dengan QRIS dengan tujuan pemerataan FinTech sebagai wujud target era Industri 4.0 di Indonesia (Mahyuni & Setiawan, 2021). Ada beberapa cara untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya pemerintah kota Banda Aceh meluncurkan program Smart City (kota cerdas). Walikota Aminullah Usman dalam Smart City Kota Banda Aceh (2021) mengatakan melalui program ini yang nantinya masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan scan kode QR saja di seluruh Merchant atau pedagang termasuk pengusaha UMKM yang menerima

transaksi pembayaran melalui aplikasi QR yang dapat terkoneksi dengan QR dan dengan program ini, diharapkan semua masyarakat di kota Banda Aceh bisa bertransaksi dengan mudah, hanya menggunakan aplikasi QRIS sehingga dapat membangun kemajuan visi dan misi smart city dan juga memulihkan perekonomian di Aceh setelah pandemi. Kepala bank Indonesia provinsi Aceh, Achris Sarwani dalam KBA.One (2021) mengatakan jumlah usahawan Aceh yang menggunakan QRIS di tahun 2021 sebanyak 65 ribu Merchant.

Pengguna QRIS di Banda Aceh didominasi Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), Usaha Besar (UBE), Public Service Obligation (PSO) dan Usaha Reguler (URE) seperti donasi/sosial, yayasan, dan lain sebagainya. Disektor UMI dengan 42.978 Merchant pengguna, UKE 15.132 pengguna, UME 4.907 pengguna, UBE 1.524 pengguna, PSO 113 pengguna dan URE 757 pengguna yang dapat disimpulkan pengguna QRIS aktif di Aceh didominasi oleh sektor UMKM berjumlah 63.017 Merchant. Hal ini menunjukkan bahwa dari 74.810 UMKM di Aceh, yang masih belum atau tidak menggunakan aplikasi QRIS ada sebanyak 11.793 unit UMKM.

Seperti disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Wibowo dalam Sartika (2022), hambatan terbesar dalam implementasi QRIS adalah literasi keuangan digital masyarakat yang masih cukup rendah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap QRIS masih belum utuh. Ditambah lagi adanya pengenaan atau potongan biaya atas transaksi sebesar 0,7 persen. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha khususnya UMKM maupun masyarakat yang ingin menggunakan QRIS. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat yang masih awam akan FinTech. Adapun kendala lainnya, masyarakat dan pelaku UMKM masih kurang memahami informasi serta cara penggunaan QRIS itu sendiri karena kebanyakan masyarakat saat ini masih melakukan transaksi dengan menggunakan uang tunai atau metode manual.

Hal ini juga didukung beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2022) yang menyatakan kendala yang dihadapi oleh BSI di Aceh dan nasabah dalam mengimplementasikan QRIS seperti tingkat literasi keuangan digital masyarakat di daerah terpencil dan kota-kota kecil yang masih rendah, Jaringan internet yang masih terkonsentrasi di pusat kota, nasabah masih banyak yang melakukan transaksi tunai dibandingkan transaksi non-tunai, dan adanya pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UMKM sehingga dibutuhkan Strategi dalam mengimplementasikan aplikasi QRIS pada nasabah BSI di Aceh.

Dari research gap di atas maka terdapat beberapa hasil implementasi QRIS memunculkan kendala dan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Maka dengan adanya penelitian baru untuk membuktikan hasil dari penelitian

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan jawaban atas penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai implementasi aplikasi QRIS bagi UMKM yang diharapkan dapat memberikan referensi dalam implementasi QRIS bagi UMKM kedepannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merangkum tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Mengetahui apa saja mekanisme penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bagi UMKM di kota Banda Aceh. 2) Mengetahui tantangan dalam penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bagi UMKM di di kota Banda Aceh. 3) Mengetahui solusi dalam penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bagi UMKM di di kota Banda Aceh.

B. TEORI

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS (Febrinda & Ningsih, 2023).

Menurut bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah sebuah standar kode QR yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi keuangan non-tunai di Indonesia. QRIS berbeda dengan QR Code biasa karena memiliki format standar yang dapat digunakan oleh semua bank dan penyedia layanan pembayaran di Indonesia. QRIS menggabungkan informasi seperti nama *Merchant*, nomor rekening, dan jumlah transaksi ke dalam satu kode QR, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR tersebut. QRIS juga memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan menggunakan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit (Bank Indonesia, 2023). QRIS memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah mempercepat proses pembayaran dan memudahkan transaksi keuangan non-tunai. QRIS juga dapat mengurangi biaya transaksi karena tidak

memerlukan infrastruktur yang rumit dan mahal seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau terminal pembayaran (Febrinda & Ningsih, 2023).

Secara keseluruhan, *QR Code* adalah salah satu jenis kode matriks dua dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia, dan terus berkembang sebagai bagian dari solusi digital dan teknologi informasi. *QR Code* juga memiliki keuntungan lain yang membuatnya populer, yaitu kemampuan untuk menyimpan lebih banyak data daripada kode batang tradisional. *QR Code* dapat menyimpan hingga 7.089 karakter numerik atau 4.296 karakter alfanumerik dalam satu kode. Hal ini memungkinkan *QR Code* digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk untuk membawa informasi produk atau layanan secara lengkap, menyimpan informasi kontak, menyediakan informasi tur lengkap untuk wisatawan, atau untuk menyimpan informasi personal seperti kartu nama digital. Selain itu, *QR Code* juga dapat dibaca dengan cepat dan mudah menggunakan perangkat mobile yang dilengkapi dengan kamera dan aplikasi pembaca *QR Code*. Ini membuatnya lebih mudah digunakan daripada kode batang tradisional, yang membutuhkan pembaca khusus (Habibi, Masruro, & Khonsa, 2020).

Dalam perkembangannya, *QR Code* juga telah diadaptasi menjadi berbagai bentuk, seperti *QR Code* dengan logo atau desain khusus untuk keperluan branding atau pemasaran, dan juga *QR Code* yang dapat diakses secara *online* melalui tautan web. Saat ini, *QR Code* terus digunakan dan berkembang dalam berbagai aplikasi, seperti pembayaran elektronik, identifikasi barang, logistik, pemasaran, dan lainnya. *QR Code* telah menjadi bagian penting dalam solusi digital dan teknologi informasi di era yang semakin terkoneksi dan *mobile* (Rumondang, Sudirman, Effendy, Simarmata, & Agustin, 2019).

Saat ini, QRIS memiliki banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang terlibat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS (Dwijayanti et al., 2022). Adapun manfaatnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi keuangan non-tunai. QRIS memungkinkan transaksi pembayaran non-tunai yang lebih cepat, mudah, dan transparan. QRIS juga dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional untuk bisnis dan pengguna, karena tidak memerlukan biaya cetak dan distribusi kartu atau pembayaran melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*).
2. Meningkatkan inklusi keuangan. QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke sistem pembayaran formal. QRIS dapat

digunakan oleh siapa saja yang memiliki ponsel pintar dan rekening bank atau e-wallet.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memudahkan transaksi pembayaran non-tunai, QRIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. QRIS juga dapat membantu bisnis kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih besar.
4. Meningkatkan keamanan transaksi. QRIS dilengkapi dengan fitur keamanan yang mencegah penipuan dan pembajakan data, seperti enkripsi dan otentikasi.
5. Meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran. QRIS mengintegrasikan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan metode yang paling mudah dan nyaman bagi mereka.
6. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian. QRIS memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau dan mengendalikan sistem pembayaran dengan lebih efektif dan efisien. QRIS juga dapat membantu bank dan penyedia layanan pembayaran dalam memperbaiki manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Sumitro, (2004), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha *souvenir*, dan sejenisnya

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian,

baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2009).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan (Anoraga, 2010). Dengan kriteria sebagai berikut:

- A. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- B. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- C. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap 17 informan, yaitu dua informan dari akademisi, 1 informan dari dinas koperasi dan UMKM, perwakilan Bank Indonesia Provinsin Aceh dan 12 informan dari pelaku UMKM. Metode analisis data Model Analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis data Interaktif meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Untuk teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber data yang diambil lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda dan akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Dalam triangulasi ini peneliti akan membandingkan hasil wawancara informan-informan yang menurut peneliti memiliki cara pandang atau pengetahuan yang berbeda serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau literatur yang berkaitan. Hal ini akan muncul berbagai pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal (Moleong, 2012).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi mendorong masyarakat untuk lebih familiar dengan transaksi keuangan digital, khususnya melalui dompet digital. Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, dompet elektronik, atau mobile banking, yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia menerapkan aturan regulasi QRIS untuk pembayaran melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dan Perubahan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. QRIS, yang mulai efektif berlaku secara nasional sejak 1 Januari 2020, menjadi bagian idalam mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, inklusi keuangan, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memajukan pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2022).

QRIS sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran, menjadikan setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang terstandarisasi dan terukur, memastikan keamanan serta kenyamanan dalam transaksi digital agar implementasi QRIS, setiap transaksi dapat diawasi oleh regulator melalui satu jalur sehingga dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap sistem pembayaran di Indonesia (www.cnbcindonesia.com, 2023).

Regulasi QRIS juga diarahkan untuk mengatasi potensi munculnya monopoli bisnis dengan memastikan bahwa semua penyedia jasa sistem pembayaran berbasis QR mengikuti standar yang sama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing, mendukung keberagaman dan inovasi di sektor pembayaran elektronik. Dalam wawancara dengan Pihak Ahli Pemasaran, Bank Indonesia Provinsi Aceh menjelaskan bahwa Bank Indonesia tengah berupaya mendorong adopsi QRIS di Kota Banda Aceh dengan fokus utama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Informan menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat QRIS bagi UMKM. Salah satu poin yang disorot adalah kemampuan QRIS dalam menyimpan riwayat transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing usaha, serta meningkatkan keamanan transaksi. Informan juga menjelaskan bahwa terdapat insentif berupa reward dan diskon yang diberikan untuk mendorong adopsi QRIS.

Beliau juga menjelaskan bahwa upaya penerapan QRIS di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Fokus presentasi dan penjelasan kepada para pelaku UMKM mencakup pemahaman yang mendalam mengenai kelebihan QRIS, dampak positif yang dihasilkan, dan cara optimal pemanfaatannya. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi non-tunai, menyediakan kemudahan dalam proses pembayaran, serta meningkatkan kualitas dan keamanan transaksi dibandingkan dengan metode pembayaran offline atau tunai.

Saat ini, penerapan aplikasi QRIS pada UMKM di Kota Banda Aceh memiliki dampak positif. Para pelaku usaha menyatakan bahwa QRIS secara signifikan mempermudah transaksi pembayaran mereka hanya dengan mengakses dengan perangkat teknologi sementara prosesnya yang sederhana dan terjangkau menjadikannya sebagai langkah efektif dalam mengadopsi transaksi non tunai sehari-hari. Dalam pandangan pihak Bank Indonesia provinsi Aceh, Aplikasi QRIS saat ini menjadi salah satu bentuk transaksi non tunai yang paling populer dan dianggap praktis serta efisien. penggunaannya dinilai mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mengarahkan masyarakat menuju masyarakat tanpa uang tunai di Indonesia khususnya pada masyarakat Banda Aceh.

Tantangan Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa UMKM di kota Banda Aceh, beberapa pengguna atau Merchant mengalami berbagai masalah atau kendala, sehingga dapat dikatakan adanya problematika dalam penerapan aplikasi QRIS di kota Banda Aceh. Dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS di sertai dari hasil wawancara dengan pihak pakar ekonomi Syariah, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh. Oleh karena itu peneliti mengelompokkan hasil analisis tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi enam bagian, yaitu:

a) Biaya Admin

Biaya administrasi QRIS merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh beberapa UMKM di Kota Banda Aceh. Dalam penerapannya Bank Indonesia telah menetapkan biaya administrasi sebesar 0,3% bagi pedagang yang menggunakan QRIS mulai Juli 2023. Biaya ini dikenakan untuk menjaga

keberlanjutan penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran untuk masyarakat, khususnya untuk menutupi biaya yang timbul. Biaya ini juga dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR), yang merupakan tarif yang dikenakan kepada pedagang terutama pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil (www.cnbcindonesia.com, 2023). Namun di beberapa UMKM yang di wawancarai ternyata mereka belum puas dalam hal pengenaan biaya ini, dikarenakan dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Terlebih lagi, beberapa UMKM seringkali terbatas dalam mengelola manajemen bisnisnya, hal ini menjadi terbebani oleh pelaku usaha untuk mengelola beban biaya administrasi QRIS dan mungkin beralih memilih pembayaran langsung tunai.

b) Kurangnya literasi Keuangan digital pada masyarakat

Tantangan ini mencakup preferensi masyarakat masih ramai menggunakan uang tunai. Literasi ekonomi digital yang rendah sebagian kalangan masyarakat, terutama di kota Banda Aceh, dan QRIS masih dijadikan opsi untuk pembayaran saat tidak dibawa uang atau lupa membawa uang. Tantangan utama yang dihadapi UMKM di Banda Aceh dalam mengimplementasikan QRIS mencakup aspek infrastruktur dan kecenderungan masyarakat yang masih lebih suka menggunakan uang tunai. Hal ini bisa dari kurangnya literasi ekonomi digital yang selama ini sering ditemukan pada masyarakat khususnya di kota banda aceh.”

Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam masalah literasi keuangan digital di kalangan pemilik usaha. Seperti yang disampaikan oleh salah satu guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry menyebutkan bahwa “Tantangannya terletak pada literasi keuangan digital yang masih rendah, karena rata-rata masih mengandalkan pola transaksi konvensional. Ini dipengaruhi oleh pemilik usaha juga. Ketika literasi ini belum merata di kalangan mereka, maka akan timbul masalah di sisi kepercayaan terhadap transaksi digital. Misalnya, jika seseorang tidak terbiasa bertransaksi secara digital, mungkin mereka akan mengalami ketakutan, kecurigaan, atau kekhawatiran apakah uang yang ditransfer masuk atau tidak karena kurangnya pemahaman mereka.” Dari pernyataan tersebut sejalan dengan sebagian UMKM yang diteliti di kota Banda Aceh. Salah satu permasalahan yang muncul adalah transaksi digital mungkin mengalami ketakutan, kecurigaan, atau kekhawatiran terkait dengan keamanan, yang bisa saja akan beralih pada transaksi secara konvensional.

c) Konektivitas Jaringan Internet

Ketersediaan jaringan internet juga menjadi salah satu tantangan yang sangat umum terjadi bagi UMKM di Kota Banda Aceh dalam pembayaran QRIS. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh menyatakan “Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam

menerapkan QRIS di Kota Banda Aceh adalah terkait dengan masalah aspek jaringan yang sangat umum terjadi.” Namun kapasitas jaringan internet yang terbatas atau gangguan teknis dapat menyebabkan transaksi dengan QRIS menjadi gagal. Di beberapa kasus tertentu, dana yang dikirimkan pelanggan tidak masuk ke saldo Merchant. Akibatnya para pelaku usaha untuk beralih melayani pelanggan bertransaksi secara tradisional.

d) Masalah Teknis Pada Aplikasi dan Perangkat

Dalam waktu tertentu, beberapa UMKM juga dapat mengalami bug atau kesalahan sistem dari Aplikasi yang berpotensi memengaruhi mengganggu pembayaran. Bug tersebut mungkin melibatkan masalah dalam pemindaian kode QR, kesalahan perhitungan nominal, atau ketidaksesuaian dengan perangkat lain seperti yang diterangkan oleh salah satu pelaku UMKM warung kopi. Bahwa beberapa pelanggan menghadapi kendala teknis saat menggunakan perangkat mereka untuk membayar melalui QRIS, terutama terkait pemindaian kode QR. Ini dapat menciptakan kesulitan dalam proses pembayaran. Ketidaktepatan dalam aplikasi QRIS dapat menyulitkan pengguna atau bahkan menyebabkan hambatan dalam bertransaksi secara non tunai.

e) Masalah waktu Transaksi Antar Bank

Beberapa UMKM seperti Kafe Better Life, Warung Makan Mie Ceker, dan Rumah Makan Minang Baru mengalami keterlambatan pencairan dana saat proses transfer antar bank. Sewaktu-waktu terjadi transaksi antara pelanggan dengan pelaku UMKM melalui QRIS antar bank menggunakan layanan mobile banking. Proses transaksi QRIS antar bank ini masih mengalami variasi waktu penyelesaian yang berbeda. Bila transaksi dilakukan pada bank yang sama umumnya dapat terselesaikan pada hari yang sama, sementara transaksi melibatkan bank yang berbeda cenderung memerlukan waktu penyelesaian hingga hari berikutnya. Keberagaman waktu penyelesaian ini dapat menimbulkan kendala bagi Merchant, terutama jika transaksi tersebut bersifat mendesak. Kesulitan tersebut dapat memengaruhi kelancaran operasional pada UMKM dan memerlukan penyesuaian dalam manajemen keuangan hariannya.

f) Tidak ada peningkatan jumlah pelanggan dan keuntungan

Di tengah pesatnya transformasi Aplikasi QRIS, sebagian besar UMKM yang di teliti melibatkan UMKM di Kota Banda Aceh, beberapa pelaku usaha

seperti King Fried Chicken, Kafe Better Life, Warkop Costa, Kios Asia Cell, Dasyafa Food, dan Warkop Tanggul Kupi telah beralih ke sistem pembayaran digital QRIS. Meskipun perubahan ini diharapkan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan bisnisnya, namun pada realitanya menunjukkan bahwa sejauh ini, belum terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggan atau penjualan bagi para pelaku usaha tersebut.

Kendala-kendala ini mencerminkan bahwa meskipun QRIS diharapkan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, implementasinya dihadapi oleh sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk dalam hal biaya, konektivitas, literasi masyarakat terhadap QRIS, masalah teknis, waktu penyelesaian transaksi antar bank dan masih belum adanya peningkatan jumlah pelanggan dan kenaikan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan atau problematika ini agar tujuan dari penerapan QRIS dapat tercapai secara lebih optimal di berbagai kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha atau Merchant di Kota Banda Aceh.

Solusi Dalam Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh

Dalam mendukung pertumbuhan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di UMKM Kota Banda Aceh serta mengatasi hambatan implementasi Aplikasi QRIS, perlu diterapkan beberapa solusi. Salah satu langkah yang dianggap penting dan akan terus diperkuat adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh tentang QRIS di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan sejumlah solusi dalam menghadapi tantangan penerapan aplikasi QRIS pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan pihak Bank Indonesia Cabang Provinsi Aceh, pakar ekonomi, dan Dinas Koperasi dan UKM Aceh terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi ini dan berusaha memaksimalkan optimalisasi penggunaan QRIS di UMKM Banda Aceh di antaranya:

a) Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi

Pemerintah Aceh dan sektor perbankan memiliki peran krusial dalam mengembangkan ekosistem pembayaran non tunai di wilayah ini. Sejalan dengan dinamika teknologi keuangan, pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai menjadi semakin penting dan relevan. QRIS membuka peluang untuk transaksi yang lebih efisien dan aman, sambil mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Aceh dapat memainkan peran aktif melalui inisiatif sosialisasi, edukasi, dan promosi QRIS. Dalam wawancara dengan pakar ekonomi syariah yang juga merupakan salah satu guru besar UIN Ar-Raniry menyatakan, "Seperti sosialisasi literasi masyarakat terhadap keuangan digital. Tentu, semua pihak, baik perbankan

maupun pelaku bisnis, harus mau mengadopsi digitalisasi agar mereka tersentuh oleh perkembangan dunia modern.” yang menegaskan bahwa pendekatan sosialisasi dan edukasi adalah kunci dalam mengatasi rendahnya literasi keuangan digital di kalangan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah Aceh dapat mengadopsi pendekatan ini sebagai bagian integral dari strategi pengembangan ekosistem pembayaran non-tunai.

Salah satu langkah pasti yang dapat diambil adalah menyelenggarakan event atau kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya QRIS. Pemerintah Aceh dapat bekerja sama dengan sektor perbankan sebagai mitra strategis. Pendapat asisten ahli di Bank Indonesia yang menyatakan “Rencana Bank Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait QRIS di Banda Aceh melibatkan sosialisasi, acara di berbagai daerah, serta event-event menarik untuk memberdayakan UMKM. Tujuannya adalah agar masyarakat terbiasa dan semakin memahami manfaat QRIS.” Dari pernyataannya dapat memperkuat konsep ini dengan menyoroti keberhasilan dalam melibatkan komunitas UMKM melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan memanfaatkan kehadiran perbankan sebagai mitra, program pelatihan, seminar, atau lokakarya dapat disusun untuk memberikan informasi praktis kepada pelaku usaha dan masyarakat secara umum mengenai penggunaan QRIS, manfaatnya, serta langkah-langkah menjaga keamanan transaksi.

Selain itu, strategi promosi melalui berbagai media menjadi penting dalam mencapai penetrasi yang lebih luas. Pemerintah Aceh dapat mengambil inspirasi dari pandangan Dinas Koperasi dan UKM Aceh, menekankan pentingnya kerjasama dengan perbankan dalam menyelenggarakan sosialisasi rutin bersama untuk memastikan UMKM memahami dan mampu mengimplementasikan QRIS. Pentingnya kampanye pemasaran yang efektif mengingat rendahnya literasi keuangan digital sebagai kendala operasional. Dengan kampanye yang tepat, masyarakat dapat diberikan informasi lebih mendalam melalui media cetak, atau platform media sosial. Hal ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan yakin untuk beralih ke metode pembayaran non tunai. Secara keseluruhan, pendekatan ini tidak hanya memperkuat kerjasama antara pemerintah Aceh dan sektor perbankan, tetapi juga merespons kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang lebih baik mengenai QRIS. Hal ini

diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam mengembangkan ekosistem pembayaran non tunai di Banda Aceh.

b) Pemberian Subsidi

Dalam konteks implementasi QRIS di Kota Banda Aceh, UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses transaksi. Salah satu hambatan signifikan yang diungkapkan oleh pelaku UMKM adalah biaya administrasi QRIS yang dinilai tinggi, terutama terkait dengan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3%. Pelaku usaha menyampaikan bahwa hal ini memberikan dampak negatif terhadap margin keuntungan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan akademisi Bapak RA juga menyatakan bahwa hambatan operasional termasuk pemotongan biaya yang ditanggung oleh UMKM menjadi salah satu tantangan utama. Dalam hal ini, solusi yang diusulkan oleh informan sejalan dengan ide pemberian subsidi atau pemotongan biaya administrasi QRIS untuk memberikan keringanan kepada UMKM. Dalam hal ini, UMKM sebaiknya menjalin kerja sama erat dengan lembaga keuangan lokal untuk bernegosiasi tarif transaksi QRIS yang lebih ramah bagi mereka. Pemerintah setempat juga bisa berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, perlu mediasi dan dialog antara UMKM dan lembaga keuangan untuk mencapai kesepakatan yang adil."

Pemerintah Aceh dapat mengambil inspirasi dari kebijakan serupa di negara atau daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan strategi ini dengan sukses. Pemberian subsidi dapat dilakukan dengan cara mengurangi atau menghapuskan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3% atau memberikan potongan harga sebagai insentif bagi UMKM yang menggunakan QRIS. Dalam wawancara dengan pihak dinas koperasi dan UKM Aceh, tidak secara langsung membahas pemberian subsidi, namun juga menyoroti pentingnya dukungan dari pihak perbankan untuk memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, subsidi atau pemotongan biaya dapat diimplementasikan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah Aceh, sektor perbankan, dan UMKM untuk mencapai dampak yang signifikan.

Melalui langkah ini, diharapkan UMKM di Banda Aceh dapat merasakan keringanan biaya administrasi QRIS, memotivasi adopsi lebih lanjut, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pemberian subsidi dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS.

c) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Jaringan

Kendala dalam konektivitas jaringan internet menjadi tantangan signifikan bagi UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengadopsi QRIS. Faktor ini

diakui sebagai hambatan utama dalam proses transaksi yang membutuhkan stabilitas dan kecepatan internet yang memadai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh, yang menyoroti aspek konektivitas jaringan sebagai salah satu tantangan utama di Banda Aceh.

Lembaga keuangan seharusnya berupaya meminimalkan kesulitan operasional, jaringan, dan sistem, serta segera memperbaiki masalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.” Juga menggarisbawahi pentingnya konektivitas yang baik untuk mendukung operasional UMKM. Kesesuaian ini memberikan dasar bagi rekomendasi untuk melakukan investasi dalam peningkatan infrastruktur jaringan internet. Lembaga keuangan lainnya perlu terlibat aktif dalam upaya ini, berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan perusahaan telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan internet di wilayah tersebut.

Referensi dari proyek-proyek serupa yang berhasil di wilayah-wilayah lain dapat menjadi panduan berharga dalam merancang langkah-langkah strategis. Langkah ini sesuai dengan saran salah satu guru besar UIN Ar-raniry, yang menekankan pentingnya investasi dalam teknologi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Peningkatan infrastruktur konektivitas jaringan tidak hanya akan mendukung penggunaan QRIS tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam ekosistem digital secara lebih luas.

Oleh karena itu, dengan melakukan investasi yang tepat dalam infrastruktur jaringan, diharapkan UMKM di Banda Aceh dapat mengatasi kendala konektivitas dan merasakan manfaat positif dari adopsi QRIS. Langkah ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

d) Program Edukasi keuangan Digital

Literasi keuangan digital di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dalam rangka meningkatkan adopsi QRIS. Pemerintah Aceh seperti yang diusulkan oleh informan, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat. Dalam konteks ini, pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh menyampaikan “Bank Indonesia mendukung UMKM yang sudah terbiasa menggunakan QRIS melalui berbagai kegiatan, termasuk event seperti BI QRIS goes to campus, program ekspo, dan fasilitasi pembuatan QRIS. Bagi UMKM yang belum terjangkau, sosialisasi intensif diadakan untuk memperluas

penggunaan QRIS.” Yang menggarisbawahi upaya sosialisasi dan edukasi terhadap UMKM di Banda Aceh, menjadi relevan. Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi seperti berupa seminar atau lokakarya, bahkan integrasi literasi keuangan digital ke dalam kurikulum pendidikan formal atau pelatihan non-formal. Dengan begitu, UMKM bisa lebih optimal dalam memanfaatkan QRIS.”

Pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh juga memastikan akses dan pemahaman yang memadai terkait QRIS dengan meminta setiap UMKM membawa kode QRIS mereka dalam setiap kegiatan, seperti pameran yang diadakan di berbagai daerah.” Melalui program edukasi keuangan digital, diharapkan masyarakat Kota Banda Aceh dapat lebih memahami manfaat QRIS dan merasa termotivasi untuk beralih ke pembayaran non-tunai. Langkah ini menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi digital ekonomi di tingkat lokal.

e) Pembaruan kualitas Aplikasi QRIS

Dari perspektif teknis, permasalahan terkait dengan aplikasi QRIS menjadi kendala utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaannya. Temuan ini senada dengan solusi yang diusulkan oleh beberapa UMKM yang telah diwawancarai, yang menyatakan bahwa pembaruan dan perbaikan pada aplikasi QRIS sangat diharapkan.

Pentingnya keberlanjutan dan pembaruan aplikasi QRIS juga ditekankan oleh perwakilan Bank Indonesia provinsi Aceh Pak Irwan, yang menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas aplikasi QRIS dan integrasinya dengan perangkat serta sistem lain. Dalam hal ini, upaya Bank Indonesia untuk mendukung UMKM dengan fasilitasi pembuatan QRIS, yang mencakup pembaruan dan peningkatan kualitas aplikasi. Dalam kerangka ini, solusi yang diusulkan adalah melibatkan pemerintah untuk mendorong kerjasama antara penyelenggara QRIS, pengembang aplikasi, dan lembaga pengawas. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pembaruan dan perbaikan aplikasi QRIS dilakukan secara berkala dan sistematis. Dengan melakukan pembaruan kualitas aplikasi QRIS, diharapkan tingkat kenyamanan pengguna dapat ditingkatkan, mendorong adopsi yang lebih luas, dan memastikan bahwa UMKM dapat bertransaksi secara efisien dan efektif.

f) Efisiensi Waktu Transaksi Antar Bank

Permasalahan waktu transaksi antar bank menjadi fokus terakhir dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi QRIS di Kota Banda Aceh. Sejalan dengan solusi yang diusulkan oleh beberapa UMKM yang telah diwawancarai, penguatan kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank-bank yang terlibat dalam transaksi QRIS menjadi langkah krusial.

Peningkatan infrastruktur teknologi perbankan dan standar interkoneksi antar bank menjadi solusi yang mendalam dan menyeluruh. Pemerintah Aceh dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Bank Indonesia dan bank-bank terkait dan memastikan bahwa proses transaksi distandarisasi dan waktu penyelesaian dikecilkan. Langkah-langkah praktis, seperti penggunaan teknologi yang mendukung interkoneksi antar bank, juga bisa diterapkan.

Dengan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan infrastruktur teknologi perbankan, diharapkan efisiensi waktu transaksi antar bank dapat ditingkatkan secara substansial. Langkah ini akan membawa manfaat besar bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menghadapi situasi mendesak dan mempercepat pertumbuhan ekosistem pembayaran non tunai di Kota Banda Aceh.

Pembahasan mengenai pemajuan pembayaran non-tunai di Kota Banda Aceh mencakup beberapa aspek kunci. Pentingnya peran Pemerintah Aceh dan sektor perbankan dalam mengedukasi masyarakat tentang QRIS sebagai metode pembayaran efisien dan aman. Diperlukan juga subsidi atau pemotongan biaya administrasi QRIS untuk mengatasi kendala biaya yang dihadapi UMKM.

Setelah itu, tantangan konektivitas jaringan internet perlu diatasi dengan investasi infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan perusahaan telekomunikasi. Literasi keuangan digital juga menjadi fokus, dengan strategi insentif untuk merubah persepsi masyarakat. Dari sisi teknis, perlu pembaruan berkala pada aplikasi QRIS dan kerjasama antar pihak terkait. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan bank-bank terlibat perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi antar bank, dengan peningkatan infrastruktur teknologi perbankan.

Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan atau problematika ini dan penerapan solusi-solusi yang terencana dengan baik, diharapkan UMKM di Kota Banda Aceh dapat merasakan manfaat maksimal dari penerapan QRIS dan teknologi pembayaran digital secara keseluruhan. Dengan dukungan pemerintah Aceh dan kolaborasi lintas sektor, potensi pertumbuhan UMKM melalui QRIS dapat dioptimalkan, memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh.

E. KESIMPULAN

Penerapan Aplikasi QRIS bagi UMKM di Kota Banda Aceh telah berhasil diadopsi secara luas dengan fokus pada sektor kopi, makanan, dan minuman. Melalui sosialisasi efektif, Bank Indonesia mampu meningkatkan pemahaman UMKM mengenai manfaat QRIS, termasuk efisiensi operasional, keamanan transaksi, dan insentif pelanggan. Proses pendaftaran dan penggunaan QRIS yang jelas, dukungan aktif dari Bank Indonesia provinsi Aceh, ekonomi lokal, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, membuktikan bahwa QRIS memiliki dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing UMKM di Kota Banda Aceh. Namun demikian, penerapan Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Banda Aceh untuk UMKM menemui sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya mencakup perbedaan nominal pembayaran dan penerimaan, biaya transaksi yang dianggap tidak sesuai, kurangnya literasi keuangan digital, ketersediaan jaringan internet yang terbatas, masalah teknis pada aplikasi dan perangkat, keterlambatan pencairan dana antar bank, dan belum adanya peningkatan jumlah pelanggan serta keuntungan bagi sebagian besar UMKM yang telah mengadopsi QRIS. Tantangan-tantangan ini mencerminkan hambatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan QRIS di kalangan UMKM, memerlukan penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.

Untuk mendorong kemajuan penggunaan QRIS di UMKM Kota Banda Aceh, sejumlah solusi perlu di implementasikan. Pemerintah Aceh dan sektor perbankan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan event. Dalam mengatasi hambatan biaya administrasi QRIS, pemberian subsidi atau pemotongan biaya bisa menjadi solusi. Infrastruktur jaringan internet perlu ditingkatkan untuk menangani kendala konektivitas. Strategi insentif, seperti diskon pajak, dapat digunakan untuk merubah persepsi masyarakat terhadap pembayaran digital. Perbaikan teknis pada aplikasi QRIS dan integrasinya dengan sistem lain diperlukan, serta kolaborasi antar bank untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi. Dengan dukungan ini, diharapkan UMKM di Kota Banda Aceh dapat merasakan manfaat optimal dari QRIS, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Amanda, F. A., & Tambunan, K. (2022). Analisis Strategi BSI Kcp Stabat Proklamasi dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Pembayaran Berbasis QRIS. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 91–98.

- Antaranews. (2022). UMKM Banda Aceh Tumbuh Hingga 92 Persen. Diambil dari <https://aceh.antaranews.com/berita/276669/umkm-Banda-aceh-tumbuh-hingga-92-persen>. Diakses pada 26 November, 2023.
- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(1), 10–17.
- Febrinda, R. R., & Ningsih, R. (2023). Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai Di Pasar Rakyat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 87–100.
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... Siswanti, I. (2020). *Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Harahap, H. A. (2021). Pengaruh Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Kepuasan Nasabah BSI Kc 2 Palangka Raya. *Skripsi*. IAIN Palangka Raya.
- Habibi, R., Masruro, D. A., & Khonsa, N. H. (2020). Aplikasi inventory barang menggunakan QR code. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Katadata. (2021). Jumlah Merchant Terdaftar QRIS Capai 12,2 Juta hingga November 2021. Diambil Dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/jumlah-Merchant-terdaftar-qr-is-capai-122-juta-hingga-november-2021>. Diakses Pada 26 November, 2023
- Mahyuni, L. P., & Setiawan, I. W. A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 23(4), 735–747.
- Maisarina, R., Irwansyah, M., & Izziah. (2017). Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Sektor Perdagangan Dan Jasa Kota Banda Aceh (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata). *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 451–460.
- Nurchaya, Y. A., & Dewi, R. P. (2019). Analisis Pengaruh Perkembangan FinTech dan E- Commerce terhadap Perekonomian Masyarakat. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 5(2), 21-35.
- Rachman, A. (2023). BI Tetapkan Tarif Baru QRIS 0,3%, Ini Alasannya!. Diambil Dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230704150326-17-451186/bi-tetapkan-tarif-baru-qr-is-03-ini-alasannya>. Diakses Pada 26 November 2023.

- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *FinTech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan kita menulis.
- Sartika, P. S. (2022). Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921–946.
- Sumitro, W. (2004). *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, T. T. . (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM. *Communnity Development Journal*, 2(3), 811–816.